

11. URUSAN KOPERASI DAN UKM

Urusan Koperasi dan UKM dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Bagian Perekonomian Setda, Kecamatan Kertek; Kecamatan Leksono, Kecamatan Watumalang; Kecamatan Mojotengah; Kecamatan Kalikajar; Kecamatan Sapuran; Kecamatan Kepil; Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang; Kecamatan Kalibawang; Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo dan Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 3.865.296.000,-** atau 0,19% dari total alokasi APBD tahun 2017 yang berjumlah Rp. 2.000.613.704.761-. Alokasi sebesar Rp. 3.865.296.000,- dapat terealisasi sebesar **Rp. 3.809.652.141,-** atau 98,56%. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.11.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	3.865.296.000	3.809.652.141
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2.195.296.000	2.175.722.655
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	370.000.000	348.918.986
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.300.000.000	1.285.010.500
B	Belanja Tidak langsung	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-
	Jumlah total	3.865.296.000	3.809.652.141

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan jumlah wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi serta semakin berkembangnya produk-produk UMKM yang lebih inovatif.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini antara lain berupa pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan peningkatan kualitas produk, dan peningkatan akses pasar. Sasaran program/kegiatan ini tidak hanya masyarakat umum tapi juga mengikutsertakan lulusan SD/SMP dan masyarakat pra sejahtera. Dengan harapan lulusan SD/SMP dan masyarakat pra sejahtera akan mempunyai ketrampilan kewirausahaan dan bisa menjadi wirausaha baru sehingga bisa meningkatkan

pendapatan keluarga yang pada akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan bagi masyarakat umum, dengan adanya program/kegiatan ini akan meningkatkan daya saing produk sehingga produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain dan berorientasi ekspor.

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Program ini bertujuan mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini antara lain pembinaan bagi lembaga keuangan mikro serta monitoring dan evaluasi KUR.

Pembinaan lembaga keuangan mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bagian Perekonomian Setda dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Sedangkan monitoring dan evaluasi KUR dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program nasional di bidang ekonomi yaitu peningkatan perekonomian rakyat melalui pemberdayaan UMKM dalam sektor permodalan melalui program KUR yang diaplikasi calon debiturnya melalui SIKP (Sistem Informasi Kredit Program). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak data UMKM Kabupaten Wonosobo yang sudah terupload dalam SIKP.

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif sehingga citra koperasi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan lebih terkoordinir serta pencapaian dari segi fungsionalitas akan lebih baik lagi. Dan juga sarana dan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi diharapkan akan semakin lengkap dan berkualitas, efektifitas lembaga koperasi semakin berfungsi baik, praktek berkoperasi yang baik dan meningkatkan pandangan positif perihal koperasi di kalangan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain pelatihan SDM koperasi yang bertujuan memberikan wawasan/pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi serta menciptakan SDM yang kreatif, inovatif baik sebagai pengurus maupun

pengelola koperasi serta mampu memberdayakan potensi yang ada sehingga koperasi menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Penilaian kesehatan koperasi juga menjadi fokus program ini. Melalui penilaian kesehatan koperasi bisa diketahui koperasi yang sehat dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, pengelolaan, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip usaha yang digunakan. Dan bisa diketahui jumlah koperasi yang sehat dan tidak sehat sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan perkoperasian.

c. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Tabel III.C.11.2
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator Kinerja berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Koperasi Aktif (Jumlah koperasi aktif/ Jumlah seluruh koperasi) x 100%	233 ----- x 100% 370 = 62,97%	235 ----- x 100% 372 = 63,17%	235 ----- x 100% 371 = 63,34%
2	Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil/ Jumlah seluruh UMKM) x 100%	57.456 ----- x 100% 58.163 = 98,78%	59.142 ----- x 100% 59.245 = 99,83%	59.293 ----- x 100% 59.405 = 99,81%

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, 2017

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari indikator prosentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi dan prosentase jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah seluruh UMKM.

Prosentase koperasi aktif di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 63,34% meningkat dibandingkan tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah koperasi, di mana jumlah koperasi tahun 2017 sebesar 371 unit mengalami penurunan 1 unit dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 372 unit. Sedangkan jumlah koperasi aktif di tahun 2017 sama dengan jumlah tahun 2016 yaitu 235 unit.

Demikian pula prosentase jumlah usaha mikro dan kecil di tahun 2017 sebesar 99,81% meningkat dibandingkan tahun 2016. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya jumlah UKM di mana tahun 2017 sebesar 59.293 unit meningkat dibandingkan tahun 2016. Kondisi ini disumbang oleh munculnya wirausaha baru skala mikro kecil yang tumbuh cukup banyak di tahun 2017. Sementara jumlah UMKM juga mengalami peningkatan, di mana tahun 2017 sebesar 59.405 meningkat dibandingkan tahun 2016. Akan tetapi peningkatan ini tidak sebanyak peningkatan usaha mikro dan kecil karena di tahun 2017 banyak juga usaha menengah yang beralih ke usaha lain dan memulai dari usaha mikro/kecil lagi serta ada pula yang sudah meningkat menjadi usaha besar.

Tabel III.C.11.3
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
1	Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM	99.83%	98.80%	97.50%	98.68	→
2	Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi	4%	5%	5.00%	100.00	○
3	Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM	0.16%	0.20%	0.18%	90.00	→
4	Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru	3%	3.00%	3.00%	100.00	○
5	Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM	2%	2.3%	2.00%	86.96	↓
6	Persentase kenaikan Jumlah UMKM	6%	7.0%	6.50%	92.86	→
7	Persentase kenaikan Aset UMKM	5%	7.0%	5.50%	78.57	↓
8	Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)	5%	7.0%	5.40%	77.14	↓
9	Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	71%	76%	73.00%	96.05	→
10	Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	7%	10%	8.00%	80.00	↓
11	Persentase UMKM memiliki perijinan	65%	69%	66.00%	95.65	→
12	Persentase kenaikan Aset Koperasi	2.21%	3.60%	3.10%	86.11	↓
13	Persentase kenaikan Omset Koperasi	2.21%	3.60%	3.20%	88.89	↓
14	Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif	57.00%	60.00%	59.00%	98.33	→
15	Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi	66%	67%	67.00%	100.00	○

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, 2017

Keterangan Status Capaian :

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah >= 100% |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90% - 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian <= 90% |

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM juga bisa dilihat dari indikator RKPD 2017. Di mana dari 15 indikator, 3 indikator sudah tercapai, 6 indikator tidak tercapai, 6 indikator tidak tercapai dan perlu upaya keras. Indikator yang tidak tercapai dan perlu upaya keras antara lain persentase koperasi terhadap jumlah UMKM, persentase kenaikan aset/omset UMKM/koperasi, persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk meningkatkan capaian tersebut perlu diintensifkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kelembagaan koperasi/UMKM, peningkatan diversifikasi dan pengembangan usaha koperasi/UMKM serta sertifikasi UMKM naik kelas.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.C.11.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	6
	b. S-1	17
	c. DI-DIV	4
	d. SMA	36
	e. SMP	10
	f. SD	14
	Jumlah	87
2	Golongan	
	a. Golongan IV	16
	b. Golongan III	35
	c. Golongan II	30
	d. Golongan I	6
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	87
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	1
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	8
	Staf/Fungsional Umum	77
	Jumlah	87

Sumber : BKD Kab. Wonosobo, 2017

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.C.11.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP	91.114.107.847,01
01	Tanah	22.634.355.500,00
02	Peralatan dan Mesin	3.219.809.986,69
	Alat-alat Besar	216.015.551,49
	Alat-alat Angkutan	1.272.738.387,77
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	107.239.580,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.464.890.548,39
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	158.925.919,04
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	65.259.942.360,32
	Bangunan Gedung	65.259.942.360,32
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2017

f. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.C.11.6**Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Koperasi dan UKM**

No	Masalah	Solusi
1	Dana/modal koperasi semakin berkurang karena tingkat pengembalian pinjaman yang terlalu lama.	Melakukan interaksi secara intensif dengan anggota serta memberikan pendidikan tentang hakekat koperasi bahwa keanggotaan menjadi kunci sukses koperasi.
2	Masih minimnya pengetahuan /kompetensi kewirausahaan dan manajemen yang mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha.	Meningkatkan kapasitas dan pendampingan usaha yang berkesinambungan (manajemen usaha, tertib pembukuan).
3	Kurangnya inovasi produk UMKM baik dari segi teknologi, manajemen, informasi maupun pasar.	Peningkatan layanan-layanan UMKM dalam hal teknologi, manajemen, promosi produk informasi pasar berbasis Online.
4	Belum adanya lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka.	Membentuk SENTRA LAYANAN UMKM sebagai pusat konsultasi dan pendampingan UMKM, yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM yang mengalami kesulitan dalam produksi maupun pemasaran.
5	Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya	Peningkatan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi